



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 21747-21756

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Evaluasi Kebijakan Bantuan Ternak Sapi Potong di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo

Rahmat Bano¹, Mohammad Ervandi^{2*}, Ishak Korompot³, Terri Repi⁴, Dewa Oka Suparwata⁵

¹Mahasiswa Program Studi Peternakan, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

^{2,4}Program Studi S2 MSDH, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

³Program Studi Peternakan, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

⁵Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

¹rahmatbano@gmail.com, ²m.ervandi@umgo.ac.id, ³ishakkorompot@umgo.ac.id, ⁴terrirep@umgo.ac.id,

⁵suparwata_do@umgo.ac.id

Abstrak

Program bantuan ternak sapi potong merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak, memperkuat usaha peternakan rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui implementasi program bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo; (2) mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program bantuan ternak sapi potong; (3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi program; dan (4) merumuskan implikasi kebijakan untuk meningkatkan keberhasilan program bantuan ternak sapi potong. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang didukung data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada peternak penerima bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan statistik deskriptif, sedangkan data kualitatif dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Evaluasi implementasi program menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Sementara itu, efektivitas program dievaluasi berdasarkan indikator pencapaian tujuan, manfaat program, dampak program, dan keberlanjutan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan ternak sapi potong berada pada kategori baik. Dimensi komunikasi program memperoleh skor indeks 0,605, sumber daya program 0,634, disposisi pelaksana 0,640, dan struktur birokrasi 0,722. Efektivitas program berada pada kategori baik hingga sangat baik dengan skor pencapaian tujuan program sebesar 0,823, manfaat program 0,854, dampak program 0,823, dan keberlanjutan program 0,782. Program bantuan ternak terbukti mampu meningkatkan kepemilikan ternak, mendukung pengembangan usaha peternakan rakyat, serta memberikan manfaat ekonomi bagi peternak penerima bantuan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Bantuan Ternak Sapi Potong, Implementasi Program, Efektivitas Program, Peternakan Rakyat

1. Latar Belakang

Pemerintah dalam konteks pembangunan peternakan memiliki peran penting melalui berbagai kebijakan dan program bantuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian peternak (Rusdiana dan Soeharsono, 2018; Kementerian Pertanian RI., 2025). Salah satu kebijakan yang banyak diterapkan oleh pemerintah daerah adalah program bantuan ternak sapi potong kepada kelompok peternak. Program bantuan ternak ini bertujuan untuk meningkatkan populasi sapi potong, memperkuat usaha peternakan rakyat, serta mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Bantuan ternak biasanya diberikan dalam bentuk sapi bakalan atau indukan kepada kelompok peternak sebagai stimulus untuk mengembangkan usaha peternakan secara berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan serta meningkatkan kemandirian peternak dalam mengelola usaha sapi potong.

Bantuan ternak tidak berkembang secara optimal, dalam banyak kasus, bahkan berpotensi menimbulkan ketergantungan peternak terhadap bantuan pemerintah (Nuhung, 2015). Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya integrasi antara aspek teknis produksi, kelembagaan peternak, akses permodalan, serta pemasaran hasil ternak (Maulita, *et al.*, 2025). Beberapa kasus menunjukkan bahwa bantuan ternak tidak berkembang sesuai harapan, bahkan ada yang mengalami penurunan populasi akibat keterbatasan pakan, manajemen pemeliharaan dan lemahnya kelembagaan kelompok peternak (Noorrahman, *et al.*, 2025).

Evaluasi kebijakan bantuan ternak menjadi penting untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi kelemahan implementasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Melalui evaluasi kebijakan dapat diketahui apakah program bantuan ternak telah memberikan manfaat

nyata bagi peternak, bagaimana proses implementasinya, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Evaluasi ini juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan bantuan ternak yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan peternak.

Kebijakan publik di bidang peternakan secara konseptual merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan sektor peternakan melalui regulasi, program dan intervensi yang terencana. Kebijakan tersebut mencakup perencanaan produksi, pengembangan teknologi, penyediaan sarana produksi, penguatan kelembagaan peternak serta distribusi hasil peternakan. Pembangunan peternakan dalam perspektif kebijakan publik menekankan pada peran pemerintah dalam menciptakan sistem usaha peternakan yang berkelanjutan, efisien dan berdaya saing. Penelitian oleh Mulyadi, *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan peternakan memiliki peran penting dalam mengatur sistem distribusi, pengembangan wilayah, serta stabilisasi produksi dan konsumsi produk peternakan.

Kebijakan peternakan harus mampu menciptakan keseimbangan antara produksi, distribusi, dan kebutuhan masyarakat sehingga sektor peternakan dapat berfungsi sebagai penopang ekonomi daerah dan penyedia pangan hewani. Setiawan, *et al.*, (2022) menyatakan bahwa kebijakan subsektor peternakan merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ternak, mendorong penerapan teknologi pertanian serta mengoptimalkan peran subsektor peternakan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi wilayah. Kebijakan peternakan yang tepat akan mendorong peningkatan produktivitas dan memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis agribisnis.

Nilamcaya, *et al.*, (2024) menegaskan bahwa kebijakan publik dalam pembangunan peternakan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas peternak, serta penguatan kelembagaan agar program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi peternak. Kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan akan mendorong partisipasi peternak dalam mengelola usaha ternak secara mandiri dan berkelanjutan. Kebijakan publik di bidang peternakan selain berfungsi sebagai regulasi juga sebagai instrumen intervensi pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan peternak seperti keterbatasan modal, teknologi, pakan dan akses pasar. Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator dan motivator dalam pembangunan peternakan. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan aturan dan kebijakan yang mendukung pengembangan peternakan; sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan bantuan dan pendampingan. Sebagai motivator, pemerintah mendorong peternak untuk meningkatkan produktivitas usaha (Kementerian Pertanian RI., 2025).

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat. Menurut pandangan evaluasi kebijakan modern, evaluasi merupakan penilaian sistematis terhadap nilai, manfaa dan dampak intervensi pemerintah untuk mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan (Huitema, *et al.*, 2011). Evaluasi kebijakan berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperbaiki implementasi program, serta memastikan akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan sumber daya publik (OECD, 2020). Fungsi utama evaluasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik yaitu menilai keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan, mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kebijakan, memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan menjadi dasar perumusan kebijakan baru.

Dunn (2018) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai kinerja kebijakan dengan menggunakan kriteria tertentu agar dapat diketahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Model evaluasi Dunn menggunakan beberapa kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Pendekatan Dunn menekankan bahwa evaluasi kebijakan harus menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

Model evaluasi CIPP merupakan salah satu model evaluasi program yang banyak digunakan dalam penelitian kebijakan publik dan evaluasi program pembangunan (Stufflebeam dan Coryn, 2014). Model ini menekankan evaluasi sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan dalam program publik. Model CIPP terdiri dari empat komponen utama, yaitu *context evaluation*, *input evaluation*, *process evaluation* dan *product evaluation*. Model CIPP menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan secara sistematis dari perencanaan hingga hasil program sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif bagi pengambil kebijakan. Model ini berorientasi pada pengambilan keputusan dan perbaikan program secara berkelanjutan.

Program bantuan ternak merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam sektor agribisnis terutama untuk mendukung peternak kecil dan masyarakat pedesaan. Menurut Habimana (2024), sebagai instrumen kebijakan publik, bantuan ternak dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas agribisnis, serta peningkatan ketahanan pangan lokal. Program bantuan ternak diposisikan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan pedesaan untuk mencapai tiga tujuan utama yaitu penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan rumah tangga (Rahman, *et al.*, 2025), stabilitas dan keberlanjutan produksi ternak dan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ternak (Fadillah,

et al., 2023). Program bantuan ternak berkontribusi terhadap kesejahteraan rumah tangga di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Bantuan ternak dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, diversifikasi aset dan ketahanan pangan namun efektivitasnya sangat tergantung pada *design* program, dukungan lanjutan dan sistem evaluasi yang *robust* (Collishaw, *et al.*, 2023). Untuk itu dampak intervensi ternak harus mempertimbangkan *outcome* jangka panjang (seperti perubahan strategi usaha dan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan) serta *outcome* jangka pendek (peningkatan stok ternak atau konsumsi pangan).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana implementasi kebijakan bantuan ternak sapi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, 2) bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan bantuan ternak sapi potong, 3) kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari, dan 4) bagaimana evaluasi kebijakan bantuan ternak sapi potong dalam meningkatkan usaha peternakan rakyat di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Tujuan penelitian yaitu: 1) mengetahui implementasi kebijakan bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, 2) mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan bantuan ternak sapi potong, 3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari, dan 4) memberikan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bantuan ternak sapi potong dalam meningkatkan usaha peternakan rakyat di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo selama tiga bulan yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data hingga penyusunan laporan hasil penelitian, yang dimulai bulan Februari sampai dengan Mei 2026. Pemilihan lokasi penelitian secara *purposive* merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian evaluasi kebijakan karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik program yang dikaji (Satwika, *et al.*, 2023; Rusmin dan Kusbandrijo, 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* (metode campuran), yaitu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian evaluasi kebijakan dengan pendekatan *mixed method* mampu menggabungkan data survei dan wawancara untuk menghasilkan evaluasi program yang lebih komprehensif (Jefia dan Yuliarti, 2025). Penelitian kebijakan publik umumnya menggunakan metode evaluasi program yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menilai efektivitas dan faktor penghambat program secara menyeluruh (Iqbal dan Muslim, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi kebijakan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai sejauh mana program bantuan ternak sapi potong telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Penelitian evaluasi program merupakan metode yang digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan (Iqbal dan Muslim, 2020). Evaluasi kebijakan dilakukan dengan menganalisis implementasi program bantuan ternak, efektivitas program, kendala pelaksanaan program dan rekomendasi kebijakan.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu berupa tingkat efektivitas program bantuan ternak, pendapatan peternak, perkembangan ternak, keberlanjutan usaha dan partisipasi peternak. Data ini diperoleh melalui kuesioner kepada peternak penerima bantuan ternak. Data kuantitatif menjadi dasar dalam mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memengaruhi kemandirian peternak sebagai prasyarat keberlanjutan program bantuan ternak (Pambudi, *et al.*, 2022). Data kualitatif berupa implementasi program bantuan ternak, kendala program, proses penyaluran bantuan, sistem pendampingan dan kebijakan pemerintah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penggunaan data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian evaluasi kebijakan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan program di lapangan (Jefia dan Yuliarti, 2025).

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua peternak penerima bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Selain itu terdapat populasi informan kualitatif yang meliputi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalemo, Kepala Bidang Peternakan, Penyuluh Peternakan, Ketua Kelompok Ternak dan peternak penerima bantuan. Informan dipilih secara sengaja berdasarkan keterlibatan langsung dan memiliki pemahaman terhadap program bantuan ternak sapi potong. Selain peternak penerima program bantuan, informan berasal dari penyuluh peternakan di lapangan dan pejabat Dinas Peternakan baik di Provinsi Gorontalo maupun di Kabupaten Boalemo. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa model yang dirumuskan selain berbasis data statistik juga realistis dan aplikatif sesuai kondisi usaha peternakan sapi potong di Kecamatan Wonosari.

Penelitian ini menggunakan desain *sequential explanatory mixed methods*, dengan tahapan yaitu tahap kuantitatif, tahap kualitatif dan integrasi hasil. Analisis data kuantitatif dilakukan melalui tahap editing, coding dan entry data, tahap analisis deskriptif, tahap uji validitas dan reliabilitas instrumen serta tahap interpretasi dan keterkaitan dengan analisis kualitatif.



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual Penelitian

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Uji Kualitas Instrumen

Ringkasan uji validitas diperoleh hasil variabel X_1 terdiri dari 2 item valid, variabel X_2 terdiri dari 5 item valid, variabel X_3 terdiri dari 5 item valid, variabel X_4 terdiri dari 5 item valid dan variabel Y terdiri dari 8 item valid. Hasil uji reliabilitas terhadap 5 variabel tersebut adalah semuanya reliabel dengan nilai reliabilitas minimal 0,653.

3.2 Implementasi Program Bantuan Ternak Sapi Potong

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel komunikasi program memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11,05. Apabila dikonversi ke dalam skor indeks, diperoleh nilai sebesar 0,605 yang berada pada kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum komunikasi dalam pelaksanaan program bantuan ternak sapi potong telah berjalan dengan baik. Nilai standar deviasi sebesar 0,71 menunjukkan bahwa variasi jawaban responden relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang hampir seragam terhadap pelaksanaan komunikasi program. Nilai kovarians sebesar 0,06 menunjukkan tingkat penyebaran data yang relatif kecil sehingga data yang diperoleh cukup homogen dan dapat menggambarkan kondisi komunikasi program secara konsisten di antara responden penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sumber daya program memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,70. Apabila dikonversi ke dalam skor indeks, diperoleh nilai sebesar 0,634 yang termasuk dalam kategori baik. Nilai standar deviasi sebesar 1,27 menunjukkan adanya variasi jawaban responden yang relatif lebih besar dibandingkan dimensi komunikasi program. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara peternak mengenai kecukupan sumber daya yang mereka terima. Nilai kovarians sebesar 0,07 menunjukkan bahwa penyebaran data masih tergolong rendah sehingga jawaban responden tetap menunjukkan kecenderungan yang relatif seragam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel disposisi pelaksana memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,80. Apabila dikonversi ke dalam skor indeks, diperoleh nilai sebesar 0,64 yang termasuk dalam kategori baik. Nilai standar deviasi sebesar 1,27 menunjukkan bahwa terdapat variasi penilaian responden terhadap disposisi pelaksana, meskipun variasi tersebut masih tergolong rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang relatif serupa mengenai sikap dan komitmen pelaksana program. Sementara itu nilai kovarians sebesar 0,07 menunjukkan tingkat penyebaran data yang relatif kecil sehingga hasil penilaian responden dapat dianggap cukup konsisten dalam menggambarkan kondisi disposisi pelaksana di lapangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel struktur birokrasi memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 19,44. Apabila dikonversi ke dalam skor indeks, diperoleh nilai sebesar 0,722 yang termasuk dalam kategori baik dan merupakan nilai tertinggi dibandingkan dimensi implementasi lainnya. Nilai standar deviasi sebesar 2,07 menunjukkan adanya variasi jawaban responden yang relatif lebih besar dibandingkan dimensi komunikasi,

sumber daya, dan disposisi pelaksana. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara responden mengenai kualitas struktur birokrasi program. Namun demikian, nilai kovarians sebesar 0,11 masih menunjukkan tingkat keragaman data yang relatif rendah sehingga secara umum persepsi responden tetap mengarah pada penilaian yang positif terhadap struktur birokrasi program.

3.3 Efektivitas Program Bantuan Ternak

Variabel pencapaian tujuan program memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,17 (skor indeks sebesar 0,823 yang termasuk dalam kategori sangat baik). Sebagian besar responden menilai program bantuan ternak sapi potong telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Nilai standar deviasi sebesar 1,482 menunjukkan bahwa terdapat variasi jawaban responden, namun penyebarannya masih relatif rendah yang mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang hampir sama mengenai keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Nilai kovarians sebesar 0,086 menunjukkan bahwa tingkat keragaman data masih tergolong kecil sehingga hasil penilaian responden dapat dianggap cukup konsisten dalam menggambarkan tingkat pencapaian tujuan program bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari.

Variabel manfaat program memperoleh nilai rata-rata sebesar 17,659 (skor indeks sebesar 0,854 yang termasuk dalam kategori sangat baik). Nilai ini merupakan salah satu nilai tertinggi pada dimensi efektivitas program, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan manfaat yang nyata dari program bantuan ternak sapi potong yang telah dilaksanakan. Nilai standar deviasi sebesar 1,039 menunjukkan bahwa tingkat variasi jawaban responden relatif rendah yang mengindikasikan bahwa persepsi responden mengenai manfaat program cenderung seragam. Nilai kovarians sebesar 0,059 menunjukkan tingkat penyebaran data yang rendah sehingga data yang diperoleh cukup homogen, mencerminkan kesamaan pengalaman dalam merasakan manfaat program.

Variabel dampak program memperoleh nilai rata-rata (*mean*) 17,171 (skor indeks sebesar 0,823 yang termasuk dalam kategori sangat baik). Program bantuan ternak sapi potong telah memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan dan aktivitas usaha peternakan masyarakat penerima bantuan di Kecamatan Wonosari. Nilai standar deviasi sebesar 0,972 menunjukkan bahwa variasi jawaban responden relatif rendah yang mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang hampir sama mengenai dampak program yang dirasakan. Nilai kovarians sebesar 0,057 menunjukkan tingkat penyebaran data yang kecil sehingga jawaban cenderung homogen dan konsisten dalam menggambarkan dampak program bantuan ternak sapi potong.

Variabel keberlanjutan program memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 12,390 (skor indeks sebesar 0,782 yang termasuk dalam kategori baik). Secara umum program bantuan ternak sapi potong mampu menciptakan keberlanjutan usaha peternakan pada tingkat yang cukup baik. Sebagian besar peternak masih memelihara ternak bantuan dan berupaya mengembangkan usaha peternakan yang telah dirintis melalui program tersebut. Nilai standar deviasi sebesar 0,771 menunjukkan bahwa variasi jawaban responden relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persepsi responden mengenai keberlanjutan program cenderung seragam. Sebagian besar peternak memiliki pandangan yang hampir sama bahwa program bantuan ternak masih memberikan manfaat yang berkelanjutan terhadap usaha peternakan mereka. Nilai kovarians sebesar 0,062 menunjukkan tingkat penyebaran data yang relatif kecil sehingga hasil yang diperoleh cukup konsisten dalam menggambarkan kondisi keberlanjutan program di daerah penelitian.

3.4 Kendala Implementasi Bantuan Ternak

Kendala teknis yang paling menonjol adalah masih diterapkannya sistem manajemen pemeliharaan ternak secara tradisional oleh sebagian besar peternak. Pemeliharaan ternak umumnya masih dilakukan berdasarkan pengalaman turun-temurun dengan penerapan teknologi budidaya yang relatif terbatas seperti pemberian pakan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan nutrisi ternak, pencatatan usaha (*recording*) hampir tidak dilakukan dan pengelolaan kesehatan ternak masih bersifat reaktif setelah muncul gejala penyakit. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas ternak yang dipelihara belum optimal dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan program bantuan ternak. Kendala berikutnya adalah lemahnya penerapan biosekuriti pada usaha peternakan rakyat, kendala ketersediaan pakan berkualitas dan beberapa kendala teknis lain yang frekuensinya relatif lebih rendah (aspek kelembagaan peternak, aspek reproduksi dan pembibitan ternak).

Kendala ekonomi yang paling banyak dijumpai adalah tingginya biaya operasional usaha peternakan, khususnya biaya penyediaan pakan. Kendala ekonomi berikutnya adalah ketidakpastian harga jual sapi hidup di tingkat peternak. Harga jual ternak sering mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, terutama dipengaruhi oleh dinamika permintaan pasar, kondisi ekonomi masyarakat serta perubahan harga daging sapi di tingkat konsumen. Kendala ekonomi berikut yang cukup sering diungkapkan responden yaitu lamanya waktu perputaran modal dalam usaha sapi potong. Hal ini berakibat kebutuhan modal kerja menjadi relatif besar dan sering kali menjadi kendala bagi peternak yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial.

Kendala pendampingan merupakan salah satu faktor yang masih memengaruhi pelaksanaan program bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari. Kendala yang paling banyak dijumpai berkaitan dengan kapasitas dan karakteristik peternak, pengelolaan kandang, lemahnya kepengurusan kelompok ternak serta masih

terbatasnya kegiatan pengawasan, monitoring, dan evaluasi program dari pihak pemerintah. Sebagian besar peternak merupakan peternak skala rakyat yang menjalankan usaha peternakan sebagai kegiatan sampingan di samping usaha pertanian atau pekerjaan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat pendidikan formal, akses informasi dan kemampuan manajerial peternak relatif beragam. Selain itu pola pikir tradisional yang masih cukup kuat menyebabkan sebagian peternak cenderung mempertahankan metode pemeliharaan yang telah dilakukan secara turun-temurun dan kurang terbuka terhadap penerapan inovasi baru.

3.5 Implementasi Program Bantuan Ternak Sapi Potong

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi implementasi program yang meliputi komunikasi program, sumber daya program, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi secara umum memperoleh kategori baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan ternak sapi potong telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan pemerintah dan mampu menjangkau kelompok sasaran yang dituju.

Dimensi struktur birokrasi memperoleh skor tertinggi dibandingkan dimensi implementasi lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa kejelasan prosedur pelaksanaan program, mekanisme penyaluran bantuan serta koordinasi antar lembaga pelaksana telah berjalan relatif baik. Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi, memperjelas pembagian tugas serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program (Wati dan Sukmana, 2026).

Dimensi komunikasi program juga menunjukkan kategori baik. Hasil ini memperlihatkan bahwa informasi mengenai program bantuan ternak telah disampaikan kepada peternak melalui kelompok ternak, penyuluh peternakan maupun pemerintah desa. Komunikasi yang baik memungkinkan peternak memahami tujuan program, mekanisme pelaksanaan, serta kewajiban yang harus dijalankan sebagai penerima bantuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fajar dan Rodiyah (2022) mengenai implementasi program bantuan pemerintah yang menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada dimensi sumber daya dan disposisi pelaksana, hasil penelitian juga menunjukkan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa petugas pelaksana, penyuluh serta aparat pemerintah yang terlibat dalam program memiliki komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Ketersediaan sumber daya dan sikap pelaksana merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Program yang memiliki tujuan yang baik tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya dan komitmen pelaksana yang memadai (Wati dan Sukmana, 2026). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari telah berjalan cukup baik berdasarkan indikator implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini.

3.6 Efektivitas Program Bantuan Ternak Sapi Potong

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan ternak sapi potong berada pada kategori sangat baik, terutama pada dimensi pencapaian tujuan program, manfaat program, dan dampak program. Sementara itu, dimensi keberlanjutan program berada pada kategori baik. Tingginya nilai pencapaian tujuan program menunjukkan bahwa bantuan ternak yang diberikan telah mampu meningkatkan kepemilikan ternak masyarakat serta mendukung pengembangan usaha peternakan rakyat. Peternak memperoleh tambahan aset produktif yang dapat dimanfaatkan untuk memperbesar skala usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Hasil ini menunjukkan bahwa tujuan utama program bantuan ternak telah tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah (Yanti, *et al.*, 2023).

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program yang mampu menghasilkan perubahan sesuai target dapat dikategorikan sebagai program yang efektif (Maulita, *et al.*, 2025). Dimensi manfaat program memperoleh nilai tertinggi dibandingkan dimensi efektivitas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peternak secara langsung merasakan manfaat ekonomi dari program bantuan ternak sapi potong. Bantuan ternak memberikan tambahan aset produktif, meningkatkan peluang memperoleh pendapatan, dan berfungsi sebagai tabungan produktif bagi rumah tangga peternak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Yanti, *et al.*, (2023) yang menunjukkan bahwa program bantuan ternak mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi rumah tangga peternak meskipun efektivitas keseluruhannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor lain.

Pada dimensi dampak program, hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan ternak tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengembangkan usaha peternakan. Aktivitas kelompok ternak menjadi lebih aktif dan kerja sama antarpeternak mengalami peningkatan. Dampak tersebut menunjukkan bahwa program bantuan ternak memiliki pengaruh sosial dan kelembagaan yang cukup signifikan dalam pengembangan peternakan rakyat.

Hasil penelitian ini dari perspektif model evaluasi CIPP menunjukkan bahwa komponen *product* telah tercapai dengan baik karena program mampu menghasilkan manfaat dan dampak yang dirasakan langsung oleh kelompok sasaran. Evaluasi tidak hanya melihat terlaksananya kegiatan program, tetapi juga perubahan yang dihasilkan setelah program dilaksanakan (Maulita, *et al.*, 2025). Sementara itu dimensi keberlanjutan program

memperoleh kategori baik, namun nilainya masih lebih rendah dibandingkan dimensi manfaat dan dampak program. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar peternak masih memelihara dan mengembangkan ternak bantuan, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat keberlanjutan usaha peternakan dalam jangka panjang.

Dalam perspektif *Organisation for Economic Co-operation and Development*, keberlanjutan (*sustainability*) merupakan salah satu indikator utama keberhasilan program karena mengukur kemampuan manfaat program untuk tetap berlangsung setelah intervensi pemerintah berakhir. Oleh karena itu, keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada keberhasilan penyaluran bantuan, tetapi juga pada kemampuan peternak dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha yang telah dibangun (OECD, 2020).

3.7 Kendala Implementasi dan Implikasinya terhadap Efektivitas Program

Meskipun implementasi dan efektivitas program berada pada kategori baik hingga sangat baik, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang berpotensi menghambat optimalisasi manfaat program bantuan ternak sapi potong. Kendala teknis yang paling dominan adalah masih kuatnya pola manajemen pemeliharaan ternak secara tradisional, lemahnya penerapan biosekuriti serta fluktuasi ketersediaan pakan berkualitas. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas ternak belum berkembang secara optimal. Selain itu masih ditemukan kendala pada aspek reproduksi ternak dan kelembagaan kelompok peternak meskipun dengan intensitas yang lebih rendah.

Pada aspek ekonomi, peternak menghadapi tingginya biaya operasional usaha, terutama biaya pakan, ketidakstabilan harga jual sapi hidup dan lamanya waktu perputaran modal usaha. Kondisi tersebut menyebabkan keuntungan usaha peternakan menjadi tidak selalu stabil dan berpotensi memengaruhi motivasi peternak dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Sementara pada aspek pendampingan ditemukan bahwa kapasitas peternak masih relatif beragam. Sebagian peternak masih memiliki pola pikir tradisional dan mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi peternakan yang lebih modern. Selain itu, fungsi kelembagaan kelompok ternak belum sepenuhnya berjalan optimal sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan usaha. Monitoring dan evaluasi dari pihak pemerintah juga dinilai masih perlu ditingkatkan. Temuan ini memperkuat teori Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi. Ketika salah satu faktor tersebut belum berjalan secara optimal, maka efektivitas program juga berpotensi mengalami penurunan (Wati dan Sukmana, 2026).

3.8 Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Ternak Sapi Potong

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, program bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari dapat dinilai telah berjalan dengan cukup efektif. Program berhasil meningkatkan kepemilikan ternak masyarakat, memberikan manfaat ekonomi bagi peternak, meningkatkan motivasi berusaha, serta mendorong pengembangan usaha peternakan rakyat. Namun hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa keberhasilan program masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek teknis, ekonomi, dan pendampingan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan tidak hanya menilai keberhasilan program dalam mencapai tujuan jangka pendek, tetapi juga mengidentifikasi berbagai faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keberlanjutan program.

Berdasarkan kriteria evaluasi OECD yang meliputi efektivitas, dampak, dan keberlanjutan, program bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari telah menunjukkan hasil yang positif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pendampingan teknis, pengembangan pakan, penguatan kelembagaan kelompok ternak, serta peningkatan monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan (OECD, 2020^b). Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan ternak sapi potong memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pengembangan peternakan rakyat di Kecamatan Wonosari. Akan tetapi keberhasilan program dalam jangka panjang memerlukan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi melalui peningkatan kapasitas peternak, penguatan kelembagaan kelompok ternak serta sistem pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif agar manfaat program dapat berlangsung secara berkelanjutan (Maulita, *et al.*, 2025).

3.9 Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari menunjukkan bahwa secara umum program telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi peternak penerima bantuan. Implementasi program berada pada kategori baik, sedangkan efektivitas program berada pada kategori baik hingga sangat baik. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan ternak sapi potong memiliki kontribusi positif terhadap pengembangan usaha peternakan rakyat, peningkatan kepemilikan ternak, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan berbagai kendala yang masih memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program, terutama pada aspek teknis, ekonomi, dan pendampingan. Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi kebijakan yang penting sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, instansi teknis peternakan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan ternak sapi potong di masa mendatang.

a. Implikasi terhadap Perbaikan Desain Program bantuan Ternak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan ternak tidak cukup hanya berfokus pada penyaluran ternak kepada kelompok sasaran. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kesiapan peternak dalam mengelola ternak bantuan, ketersediaan sarana pendukung, serta keberlanjutan pembinaan setelah bantuan diberikan. Desain program bantuan ternak perlu diarahkan tidak hanya pada pendekatan bantuan fisik (*asset-oriented approach*), tetapi juga pada pendekatan pemberdayaan peternak (*empowerment-oriented approach*).

Pemerintah dalam pelaksanaannya perlu memperkuat mekanisme seleksi penerima bantuan dengan mempertimbangkan kesiapan teknis, pengalaman beternak, ketersediaan pakan serta kemampuan peternak dalam mengembangkan usaha ternak secara berkelanjutan. Dengan demikian bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Selain itu program bantuan ternak perlu dirancang sebagai program pengembangan usaha yang terintegrasi, bukan sekadar kegiatan distribusi ternak. Bantuan ternak sebaiknya disertai dengan dukungan pelatihan, pendampingan teknis, penguatan kelembagaan, serta akses terhadap sarana produksi dan pemasaran sehingga manfaat program dapat berlangsung dalam jangka panjang.

b. Implikasi terhadap Penguatan Kapasitas Peternak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama implementasi program adalah masih dominannya pola pemeliharaan ternak yang bersifat tradisional dan rendahnya tingkat adopsi teknologi peternakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternak menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program bantuan ternak.

Pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi peternakan perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas kegiatan penyuluhan, pelatihan, serta pembinaan teknis kepada peternak. Materi pendampingan tidak hanya berfokus pada teknik budidaya ternak, tetapi juga mencakup manajemen usaha peternakan, pengelolaan pakan, kesehatan hewan, reproduksi ternak, dan pencatatan usaha (*recording*).

Peningkatan kapasitas peternak menjadi penting karena keberhasilan program bantuan ternak pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan peternak dalam mengelola dan mengembangkan ternak yang diterima. Semakin tinggi kapasitas peternak, semakin besar peluang program untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

c. Implikasi terhadap Pengembangan Pakan dan Efisiensi Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan pakan berkualitas yang fluktuatif dan tingginya biaya pakan merupakan kendala yang paling dominan dalam usaha peternakan sapi potong. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan peternakan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan sumber daya pakan ternak.

Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan kawasan hijauan pakan ternak, pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber pakan alternatif, serta penerapan teknologi pengawetan pakan seperti silase dan hay. Upaya tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan peternak terhadap ketersediaan hijauan musiman yang sering menjadi penyebab meningkatnya biaya produksi. Selain itu diperlukan program pelatihan mengenai formulasi pakan berbasis sumber daya lokal agar peternak mampu menyediakan pakan secara lebih efisien dan berkelanjutan. Kebijakan ini akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas ternak dan efisiensi usaha peternakan rakyat.

d. Implikasi terhadap Penguatan Kelembagaan Kelompok Ternak

Penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan kelompok ternak masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada aspek kepengurusan, koordinasi internal, dan keberlanjutan aktivitas kelompok. Padahal kelompok ternak memiliki peran yang sangat penting sebagai media pembelajaran, kerja sama dan pengembangan usaha peternakan masyarakat. Kebijakan pengembangan peternakan perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penguatan kelembagaan kelompok ternak. Pemerintah dapat melakukan pembinaan organisasi kelompok secara berkala, meningkatkan kapasitas kepemimpinan pengurus kelompok, serta mendorong kelompok ternak untuk berkembang menjadi kelembagaan ekonomi peternak yang lebih mandiri. Penguatan kelembagaan kelompok ternak juga penting untuk meningkatkan posisi tawar peternak dalam memperoleh akses terhadap permodalan, sarana produksi, teknologi dan pemasaran hasil ternak. Kelembagaan yang kuat akan mempertahankan keberlanjutan program bantuan ternak.

e. Implikasi terhadap Sistem Monitoring dan Evaluasi Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa monitoring, pengawasan dan evaluasi program bantuan ternak masih perlu ditingkatkan. Dalam beberapa kasus, keterbatasan monitoring menyebabkan berbagai permasalahan yang muncul di tingkat peternak tidak dapat segera teridentifikasi dan ditangani secara cepat. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data lapangan. Monitoring selain dilakukan pada saat penyaluran bantuan juga harus mencakup perkembangan ternak, tingkat keberhasilan reproduksi, keberlanjutan usaha peternak dan kondisi kelembagaan kelompok ternak setelah program.

Evaluasi program secara berkala juga penting untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan dan menjadi dasar dalam penyempurnaan program pada periode berikutnya. Dengan sistem monitoring dan evaluasi

yang lebih kuat, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

f. Implikasi terhadap Kebijakan Pembangunan Peternakan Rakyat

Hasil penelitian ini secara lebih luas menunjukkan bahwa program bantuan ternak sapi potong masih relevan sebagai salah satu instrumen kebijakan pembangunan peternakan rakyat di daerah pedesaan. Program ini terbukti mampu meningkatkan kepemilikan aset produktif masyarakat, memperkuat usaha peternakan rakyat, serta memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi peternak penerima bantuan.

Keberhasilan program akan lebih optimal apabila kebijakan bantuan ternak diintegrasikan dengan program pemberdayaan peternak, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, pengembangan pakan, peningkatan akses pembiayaan usaha peternakan, serta dukungan pemasaran hasil ternak. Pendekatan yang terintegrasi tersebut akan mendorong terciptanya sistem agribisnis peternakan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan bahwa program bantuan ternak sapi potong perlu diarahkan tidak hanya sebagai program distribusi bantuan, tetapi sebagai instrumen pembangunan peternakan rakyat yang berbasis pemberdayaan, peningkatan kapasitas peternak, penguatan kelembagaan dan keberlanjutan usaha. Melalui pendekatan tersebut, tujuan pembangunan peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan memperkuat ekonomi peternak dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu: 1) Implementasi program bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari tergolong baik, 2) Efektivitas program bantuan ternak sapi potong berada pada kategori sangat baik, 3) Kendala implementasi program bantuan ternak sapi potong masih ditemukan pada aspek teknis, ekonomi dan pendampingan, dan 4) Kebijakan bantuan ternak sapi potong masih relevan untuk mendukung pengembangan peternakan rakyat namun memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Saran yang dapat disampaikan yaitu: 1) Pemerintah daerah dan dinas peternakan perlu mengembangkan program bantuan ternak yang selain berorientasi pada penyaluran ternak juga menekankan aspek pemberdayaan peternak melalui pendampingan teknis yang berkelanjutan, 2) Penyuluh peternakan perlu meningkatkan intensitas pembinaan kepada peternak terutama dalam aspek manajemen pemeliharaan ternak, biosekuriti, reproduksi, kesehatan ternak serta pengelolaan pakan berbasis sumber daya lokal, 3) Kelompok ternak perlu memperkuat kelembagaan organisasi melalui peningkatan peran pengurus, pelaksanaan pertemuan rutin dan pengembangan kegiatan pembelajaran kelompok, 4) Peternak penerima bantuan perlu meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial dalam usaha peternakan, terutama terkait penyediaan pakan, kesehatan ternak, reproduksi dan pencatatan usaha, dan 5) Penelitian ini masih terbatas pada evaluasi implementasi dan efektivitas program bantuan ternak sapi potong di Kecamatan Wonosari. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak ekonomi program secara kuantitatif melalui analisis pendapatan, efisiensi usaha, dan kesejahteraan rumah tangga peternak.

Referensi

1. Collishaw, A., S. Janzen, C. Mullally dan H. Camilli. 2023. *A Review of Livestock Development Interventions' Impacts on Household Welfare in Low-and Middle-Income Countries*. University of Illinois. Version of Record: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912423000342>
2. Manuscript_a90d82078fc853eb829b7976f6e96d13
3. Dunn, W. N. 2018. *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
4. Fadillah, T., I.W. Syarfi dan A. Agustar. 2023. Keberlanjutan Usaha Peternakan Sapi Potong Program Bantuan Pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Niara* Vol.16(1): 188-197. DOI: <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.14098>
5. Habimana, J. 2024. *Rural Development Strategies through Livestock Policy*. *International Journal of Livestock Policy* Vol.3(1): 1-15. DOI: <https://doi.org/10.47941/ijlp.1747>
6. Huitema, D., A. Jordan, E. Massey, T. Rayner, H. van Asselt, C. Haug, R. Hildingsson, S. Monni dan J. Strippel. 2011. *The Evaluation of Climate Policy: Theory and Emerging Practise in Europe*. *J. Policy Sci.* Vol.2011(44): 179-198. DOI [10.1007/s11077-011-9125-7](https://doi.org/10.1007/s11077-011-9125-7)
7. Iqbal, M., dan A. Muslim. 2020. Metode Penelitian Kebijakan Pendidikan (Alternatif Metodologi dalam Penyusunan Skripsi). *Jurnal Visionary* Vol.9(1): 54-61. DOI: <https://doi.org/10.33394/vis.v5i1.3125>
8. Jefia, R. dan Yuliarti. 2025. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* Vol.6(1): 1-12. DOI: <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.175>
9. Maulita, M., N. Sofyana, N. Ainun dan Taufik. 2025. Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Ternak Sapi Potong di Desa Laantula Jaya Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali. *Jurnal Pertanian JASA HAR* Vol.1(1): 1-13.
10. Mulyadi, M., P. Gusbager, M. Sagrim, Y.Y. Runtuboi, D.A. Iyai, N. Inriani, A. Baaka, dan S. Package. 2024. *Distribution, development, stabilizer and consumers areas of livestock and forages-based crops: An empirical status of bordered Keerom Regency, West New Guinea-Indonesia*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan* Vol.34(3): 332-348.
11. Nilamcaya, M., B. Bastoni, E. Nurhawaeny dan R.. Widyani. 2024. *Public Policy and Community Empowerment in the Development of Sheep and Goat Farming in Indonesia*. *Jurnal Polisci* Vol.1(5): 237-248.
12. Noorrahman, N.F., R.S. Dwijayanti dan A. Sandriya. 2025. Indikator Tingkat Keberhasilan Program Sikomandan Terhadap Populasi, Pemetongan dan Produksi Daging Sapi Potong di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Peternakan Indonesia* Vol.27(2): 130-137. DOI: <https://doi.org/10.25077/jpi.27.2.130-137.2025>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10156>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

13. Nuhung, I.A. 2015. Kinerja, Kendala dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging Sapi. Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol.33(1): 63-80.
14. OECD. 2020^b. *Policy Framework on Sound Public Governance: Baseline Features of Governments that Work Well*. OECD Publishing Paris.
15. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2021. *Pedoman bantuan ternak dan pengembangan sapi potong*. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
16. Kementerian Pertanian RI. 2025. Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Asal Ternak. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementan RI.
17. Pambudi, R., D.A. Aprilia, E. Sedyono dan P Widodo. 2022. *Systematic Literature Review Analisis Perbandingan Faktor yang Berpengaruh pada Kesuksesan Sistem Enterprise*. Jurnal Sistemasi Vol.11(3): 655-663.
18. Rahman, I., H.A. Hadini dan M. Abadi. 2025. Evaluasi Program Bantuan Ternak Sapi Bali di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat. JIPHO Vol.7(1): 18-24. DOI: <https://doi.org/10.56625/jipho.v7i1.235>
19. Rusdiana, S., dan Soeharsono. 2018. Program SIWAB Untuk Meningkatkan Populasi Sapi Potong dan Nilai Ekonomi Usaha Ternak. Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol.35(2): 125-137.
20. Rusmin dan B. Kusbandrijo. 2024. Implementasi Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Bidang Renalev Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Jurnal PRAJA Observer Vol.4(3): 101-115.
21. Satwika, P., L. Abdullah dan N.R. Kumalasari. 2023. Evaluasi Program Peningkatan Penanaman Hijauan Pakan Ternak Menggunakan *Analytical Hierarchy Process*. Jurnal Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pangan Vol.21(2): 116-122.
22. DOI: <https://dx.doi.org/10.29244/jintp.21.2.116-122>
23. Setiawan, A., B. Guntoro, dan F.T. Haryadi. 2022. *Policy analysis and role of livestock subsector in the development at Purworejo Regency, Central Java*. Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan Vol.32(3): 427-436.
24. Stufflebeam, D. L., dan C.L.S. Coryn. 2014. *Evaluation theory, models and applications*. Jossey-Bass.